



KEMITRAAN PUBLIK DAN SWASTA DALAM PENANGANAN MASALAH STUNTING DI KOTA YOGYAKARTA

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HANDLING STUNTING PROBLEM IN YOGYAKARTA CITY

Andhika Hidayaturrahman¹, Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 07-11-23

Diperbaiki 24-11-23

Disetujui 07-12-23

Kata Kunci:

Kemitraan Publik dan Swasta, Program 1000 Pelangi Goes to Community, Stunting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanganan masalah stunting di Kota Yogyakarta melalui proses kemitraan publik dan swasta dalam Program 1000 Pelangi Goes To Community dan faktor pendukung serta kendala selama pelaksanaan program. Urgensi dari penelitian ini karena pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan pihak swasta dalam penanganan masalah stunting karena keterbatasan baik dari anggaran maupun sumber daya. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tempat penelitian di sembilan Kelurahan di Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, dan PKPU Human Initiative, dan posyandu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kemitraan pada Program 1000 Pelangi Goes To Community ini belum sepenuhnya efektif sesuai dengan teori *hollow state* dari Provan dan Milward karena masih bersifat CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) sehingga belum adanya pembagian pendanaan dari pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta yang belum menjadi inti agensi dalam pelaksanaan program, dan tidak terlihatnya peran pemerintah dalam fungsi negosiasi dan pengawasan hanya sebatas fasilitator saja sehingga proses kemitraan menjadi terfragmentasi. Dampak penelitian ini terkait penanganan kasus stunting berimplikasi pada pemerintah membuat format kemitraan publik dan swasta yang berkelanjutan, berperan lebih strategis lagi, dan keterbukaan terkait pelaksanaan program.

ABSTRACT

Keywords:

Public Private Partnership, 1000 Pelangi Goes To Community Program, Stunting

This study attempts to explain how the 1000 Pelangi Goes To Community Program handled the stunting issue in Yogyakarta City, as well as the motivating elements and challenges encountered throughout program implementation. Due to resource and budget constraints, the Yogyakarta City administration needs the private sector to manage the stunting issue, making this research urgent. Descriptive research methods are used in a qualitative research strategy. ways for gathering data, including documentation, interviews, and observation. The research is being held at nine sub-districts in Yogyakarta City, the PKPU Human Initiative, the Yogyakarta City Development Planning Agency at the sub-national level, and an integrated services post. The results of this study show that the partnership process in the 1000 Pelangi Goes To Community Program is not yet fully effective because it is still CSR or Corporate Environmental Social Responsibility. (TSLP) so that there is no distribution of funding from the Yogyakarta City government, the Yogyakarta City government is not yet the core agency in implementing the program, and the government's role in negotiating and monitoring functions is limited to being a facilitator so that the partnership process becomes fragmented. The impact of this study regarding the government's handling of stunting cases is to create a sustainable public and private partnership format, play a more strategic role, and openness regarding program implementation.

1. Pendahuluan

Stunting merupakan persoalan kesehatan yang memiliki tingkat keparahan tinggi biasanya dialami oleh anak-anak karena pemenuhan gizi yang tidak tepat dalam jangka waktu yang lama yaitu 1000 hari pertama kehidupan, sehingga menyebabkan pertumbuhan anak menjadi tidak baik berupa postur tubuh yang kerdil dari usianya. Banyak faktor yang menyebabkan masalah stunting ini terjadi. Faktor penyebab yang secara langsung mempengaruhi masalah stunting adalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Dua penyebab langsung ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor tidak langsung yaitu tingginya angka kemiskinan, pengasuhan anak yang kurang tepat, terbatasnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, akses air bersih yang kurang baik, dan sanitasi yang buruk.

Permasalahan stunting ini tidak bisa dianggap remeh karena akan berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari stunting ini yang tidak hanya berdampak pada kesehatan saja tetapi hampir segala bidang kehidupan. Dampak jangka pendek mampu meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada anak-anak. Berdasarkan riset OECD PISA dampak jangka menengah dari stunting yaitu membuat tingkat kognitif dan intelektualitas menjadi rendah dikarenakan pertumbuhan sel otak pada anak stunting terbatas daripada anak-anak yang normal. Sedangkan, dampak jangka panjang dari stunting ini yaitu membuat kualitas SDM Indonesia menjadi rendah, menimbulkan penyakit degeneratif, dan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Selain dari sisi kesehatan, sisi sosial dan ekonomi juga terdampak, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2017 menghimpun data bahwa karena adanya stunting ini pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan menurunnya produk domestik bruto sebesar 11% serta 20% pendapatan pekerja dewasa menurun akibat produktivitas pasar kerja yang menurun. Selain itu, jurang kesenjangan sosial ekonomi akan semakin terbuka karena sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan pendapatan seumur hidup akan menurun dan kemiskinan generasi ke generasi akan hadir akibat persoalan stunting.

Secara global, masalah stunting ini terjadi penurunan sekitar 1,8% per tahun atau dalam 10 tahun berkurang hanya 18% yang mana masih jauh dari angka yang ditargetkan yaitu sebesar 3,9% per tahun (De Onis, et al., 2013). Untuk Indonesia, Studi yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI dan Badan Pusat tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting nasional dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021 atau diakumulasi terjadi penurunan sebesar 1,6% per tahun tetap saja angka tersebut masih belum mencapai target yang sudah WHO tetapkan yaitu 20% (Kementerian Kesehatan, 2021). Untuk Kota Yogyakarta, angka stunting pada rentang periode 2017-2021 cenderung fluktuatif yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

No.	Status Gizi	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)
1.	Tinggi	307	2,1	316	2,2	194	1,4	57	0,5	46	0,41
2.	Normal	11981	83,6	12238	85,0	12103	87,3	10141	85,2	9648	86,71
3.	Pendek	1589	11,1	1513	10,5	1340	9,7	1366	11,5	1129	10,15
4.	Sangat Pendek	441	3,1	334	2,3	227	1,6	340	2,9	304	2,73

Sumber data : Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG) Puskesmas

Tabel 1. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 Dengan Indikator Tinggi Badan Menurut Umur

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka stunting di Kota Yogyakarta berada pada angka 14,2%, tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 12,8%, tahun 2019 terjadi penurunan lagi menjadi 11,3%, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 12,88%. Untuk tahun 2022, dilansir dari Antara News Jogja menunjukkan bahwa angka stunting di Kota Yogyakarta terjadi penurunan dari tahun 2021 yaitu menjadi 10,8%. Walaupun terjadi penurunan dan dibawah rata-rata nasional, tetapi angka tersebut masih tinggi karena merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu 7,92%.

Dari permasalahan, dampak, dan kondisi dari stunting yang telah dijabarkan di atas. Perlu adanya jalan keluar atau solusi dalam penanganan masalah stunting ini. Tentu saja pemerintah kota Yogyakarta tidak bisa sendiri dalam bertindak, diperlukan pihak-pihak lain untuk bekerjasama dengan pemerintah agar penanganan masalah stunting ini dapat berjalan dengan maksimal sehingga bisa mencapai target yang telah dibuat dalam rencana strategis atau bahkan bisa melampaui target. Esensi dari kemitraan di Indonesia biasa disebut dengan istilah gotong royong atau kerjasama secara berkelompok (Arimurti, et al, 2021). Kerjasama yang dilakukan biasa disebut dengan kemitraan publik dan swasta (public private partnership). Kemitraan publik dan swasta adalah suatu bentuk kerjasama yang mekanismenya pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta dalam melaksanakan separuh atau seluruh kegiatan pembangunan pengoperasian infrastruktur yang didasari oleh kepercayaan yang tujuannya untuk memberikan keuntungan antar pihak-pihak yang bermitra.

Adanya kemitraan publik dan swasta ini selain dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan stunting yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah secara mandiri juga dilatarbelakangi oleh kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta serta dengan adanya kelebihan dan kekurangan ini menjadikan pihak-pihak yang bermitra saling melengkapi. Kelebihan pemerintah yaitu mempunyai aturan atau wewenang yang jelas sehingga kemitraan publik dan swasta bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan utama dan juga pemerintah memiliki kedekatan yang lebih baik dalam lingkup kehidupan masyarakat seperti contohnya Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberdayakan masyarakat sebagai kader posyandu dan relawan sehat. Swasta juga mempunyai kelebihan yaitu swasta sudah memiliki modal dan penunjang lainnya yang lebih memadai, pendanaan yang optimal, rantai birokrasi yang lebih ringkas, dan transfer pengetahuan dan keahlian.

Dalam hal ini, PT. Sarihusada Generasi Mahardhika mempunyai fasilitas riset dan inovasi bertaraf internasional untuk pengembangan inovasi produk nutrisi dan beberapa kegiatan seperti Isi Piringku, Bunda Mengajar, dan Warung Anak Sehat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program kemitraan terkadang tidak terlepas dari adanya proses bisnis lainnya dari pihak swasta, salah satunya adalah CSR atau tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TSLP). Terdapat perbedaan secara konseptual antara public private partnership dan corporate social responsibility. Public private partnership atau kemitraan publik dan swasta pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak. Dalam

kemitraan terdapat upaya untuk melibatkan berbagai komponen baik sektor swasta, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing (Arimurti, et all, 2021). Dalam public private partnership ada beberapa karakteristik yaitu pihak swasta menjalankan sebagian besar fungsi pemerintah dalam waktu tertentu, pihak swasta mendapatkan kompensasi atas pelaksanaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari pelaksanaan kemitraan tersebut (William, 2009). Hal-hal yang menimbulkan perlunya kemitraan publik swasta atau public private partnership ini adalah terbatasnya kapabilitas pemerintah, infrastruktur yang sudah kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, dan teknologi yang dimiliki oleh pihak swasta (Dwinanta, 2010).

Sedangkan CSR memiliki tiga konsep dasar yaitu perusahaan atau pihak swasta memiliki peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dalam membantu pemerintah dalam mengatasi atau menanggulangi permasalahan sosial dan lingkungan, sehingga pihak swasta mempunyai kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Kedua, selain berorientasi pada profit atau keuntungan, perusahaan memisahkan sebagian keuntungan untuk melakukan kedermwanaan (*filantropi*) yang bertujuan dalam pemberdayaan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, CSR atau TSLP ini adalah wujud dari kewajiban pihak swasta (*obligation*) untuk peduli terhadap permasalahan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan sekitar (TR Marnelly, 2012).

Pemerintah dalam kemitraan yang mengandalkan CSR atau TSLP ini banyak menerima manfaat seperti dukungan pembiayaan, dukung sarana prasarana, dan dukungan keahlian sehingga pemerintah cukup berperan dalam urusan yang sifatnya birokratis saja (Mardikanto, 2014). Manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR yang mereka lakukan yaitu dapat membuat citra perusahaan akan semakin baik, lingkungan sosial menjadi lebih baik, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan akuntabilitas, dan menurunkan kerentanan masalah dengan masyarakat (Wahyuningrum, 2015). Sedangkan untuk masyarakat sendiri dengan adanya CSR atau TSLP ini mampu menjadi peluang kesempatan kerja, meningkatkan keahlian, dan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur (Mardikanto, 2014).

Terlepas dari kelebihan yang sudah dipaparkan, terdapat juga beberapa kekurangan dari kemitraan yang mengandalkan pada CSR seperti risiko politik terkait dengan kerja sama jangka panjang antar sektor publik dan swasta, faktor eksternal yang sewaktu-waktu dapat dengan mudah berubah dan sangat mudah tidak terprediksi, pemeliharaan peralatan ataupun perlengkapan yang susah dan harga pemberian layanan yang sering tidak sesuai, proses pengadaan yang panjang karena birokrasi pemerintahan, transfer risiko yang tidak lengkap, serta biaya penggunaan akhir yang lebih tinggi.

Banyak program kemitraan penanganan stunting yang dilakukan oleh para aktor, baik dari pemerintah dan pihak swasta di Kota Yogyakarta. Salah satunya program Aksi 1-8 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kota Yogyakarta yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) beserta OPD-OPD

lainnya di Kota Yogyakarta. Program tersebut dimulai dari analisis situasi hingga inovasi percepatan penurunan angka stunting seperti Dapur Balita Sehat, GEMBROT (Gemar Makan Berbahan Protein) oleh Dinas Pertanian dan Pangan, FGD Ketahanan Keluarga Bebas Stunting oleh BAZNAS, pelibatan mahasiswa, hingga ruang laktasi portable. Selain itu juga, banyak program CSR yang diberikan oleh pihak swasta dalam penanganan masalah stunting seperti program 1000 Pelangi Goes To Community oleh PT. Sarihusada Generasi Mahardhika.

PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dalam penanganan masalah stunting ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dalam bentuk program 1000 Pelangi Goes to Community. Dilansir dari Republika.id, Program 1000 Pelangi Goes to Community adalah program yang dikembangkan dari program 1000 Pelangi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemahaman masyarakat dalam memahami 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Program ini dilakukan di 3 kelurahan di Kota Yogyakarta untuk menanggulangi permasalahan stunting di kelurahan-kelurahan tersebut. Banyak dukungan dari berbagai mitra untuk program 1000 Pelangi Goes to Community ini seperti dari pemerintah Kota Yogyakarta, Forum CSR Perusahaan (TSLP) Kota Yogyakarta, Camat Umbulharjo, dan lurah dari 3 daerah percontohan. PT. Sarihusada Generasi Mahardhika juga menggandeng PKPU Human Initiative Yogyakarta sebagai pendamping. Program ini sampai sekarang sudah merealisasikan kegiatan-kegiatannya kepada 188 penerima manfaat yang terdiri dari 117 balita dan 71 ibu hamil. Program 1000 Pelangi ini dipilih oleh peneliti untuk diteliti karena program ini terdapat banyak kegiatan yang menysasar pada penanganan stunting tidak hanya pemberian makanan saja. Beragam kegiatan yang dilakukan meliputi urban farming berupa budidaya sayur dan buah serta peternakan yang memanfaatkan lahan yang terbatas tetapi mampu mencukupi kebutuhan protein warga, kegiatan Bunda Mengajar berupa sosialisasi yang mendatangkan narasumber terbaik yang membuka wawasan bagi masyarakat terkhususnya kader posyandu karena dengan kegiatan ini kader posyandu menjadi lebih aktif dan mampu membantu masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang, dan Isi Piringku berupa edukasi terkait makanan yang bergizi seimbang. Selain itu juga, program 1000 Pelangi Goes To Community ini sifatnya berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang dilakukan selama 8-9 bulan per tahunnya.

Dari pemaparan di atas, walaupun pemerintah Kota Yogyakarta sudah menjalin kerjasama dengan PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dengan program 1000 Pelangi Goes to Community dan angka stunting cenderung turun serta dibawah rata-rata nasional, tetapi angka stunting di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi target dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selain itu juga, penanganan masalah stunting ini merupakan salah satu agenda program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pada tujuan ke-3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik (good health and well-being), sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kemitraan Publik dan Swasta dalam Penanganan Masalah Stunting di Kota Yogyakarta terutama pada proses kemitraan, peran dari para pemangku kepentingan, hingga pada faktor pendukung dan penghambat dari kemitraan ini.

Untuk melakukan kajian dan analisis tentang kemitraan publik dan swasta dalam penanganan masalah stunting di Kota Yogyakarta, maka penulis perlu memahami tentang konsep governance dan kemitraan publik dan swasta (hollow state) dari Provan dan Milward (1994). Asal muasal konsep governance berasal dari istilah government yang berarti lembaga atau organisasi yang melaksanakan otoritas pada suatu negara. Government merupakan konsep lama dalam pelaksanaan pemerintahan karena hanya berpusat pada pemerintah/lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah. Kemudian berkembang konsep pemerintahan yang lebih luas lagi yang tidak hanya menekankan pada peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga masyarakat dan swasta yang dikenal sebagai governance. Peran serta masyarakat dan swasta disini berupa pengelolaan dan pengawasan terhadap pemerintah. Governance menjamin proses kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran masyarakat dan swasta dalam pengontrolan (Taschereau dan Campos, 1997).

Sedangkan kemitraan publik dan swasta dikenal sebagai gotong royong atau kerjasama yang melibatkan berbagai pihak secara individu ataupun kelompok. Konsep kemitraan ini melibatkan berbagai komponen dari pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat untuk berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan, prinsip, dan peran. Konsep hollow state berfokus pada pentingnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, pengurangan dampak sosial dan lingkungan, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk mempercepat program pemerintah, serta untuk meminimalisir dampak dan risiko yang akan terjadi (Kriswibowo et al., 2021). Pengelolaan pemerintahan yang baru dikenalkan oleh Provan dan Milward (1994) yang dikenal dengan teori hollow state yaitu pekerjaan pemerintah lebih banyak dilakukan (contacting out) oleh pihak ketiga sehingga pemerintah hanya mengurus urusan yang sifatnya krusial saja. Kemitraan publik dan swasta ini dikenal juga dengan sebutan Public Private Partnership (PPP). Adapun indikator yang menjadi fokus konsep hollow state dalam kemitraan publik dan swasta yaitu mekanisme, struktur, dan intensif.

Indikator pertama yaitu mekanisme yang artinya adalah mekanisme birokrasi mempunyai sedikit perintah dan mekanisme kontrol, serta fleksibilitas yang tinggi dalam mengubah dan mengadaptasi sesuai yang dibutuhkan. Terdapat 3 tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, kontrak dan evaluasi. Jika pemerintah sanggup dalam mengontrol tiga mekanisme kemitraan diatas, maka proses dalam kemitraan dapat terintegrasi dan tidak terfragmentasi sehingga mampu mencapai efektivitas kerja dengan baik. Indikator kedua ialah struktur yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan. Struktur akan efektif jika jaringan aktor-aktor yang terintegrasi secara sentral melalui satu inti agensi. Struktur ini memberikan cara agar integrasi dan koordinasi dapat diwujudkan secara lebih efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan bersama antara pemerintah dan swasta serta pemerintah tetap pada fungsi integrasinya yaitu bertanggung jawab dalam negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak. Indikator ketiga adalah insentif yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta dalam proses kemitraan agar proses kemitraan berjalan dengan efektif. Insentif yang terintegrasi mempengaruhi efektivitas dari program kemitraan itu

sendiri yang maksudnya ialah pendanaan yang transparan dan akuntabel mampu menghasilkan kinerja ataupun produktivitas yang lebih baik daripada sistem pendanaan yang minim. Ada empat tipe insentif yaitu modal, sumber daya, sistem, dan pembagian kerja.

Beberapa penelitian sebelumnya juga ada yang mengkaji tentang penanganan masalah stunting dilihat dari sisi kemitraannya atau disebut dengan collaborative governance. Seperti contohnya penelitian yang dilakukan oleh Ipan, Hanny, dan Evi dengan judul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Ciampel tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam penanganan stunting di Puskesmas Ciampel sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi keterlibatan masyarakat masih minim. Penelitian yang dilakukan oleh Evalia dan Herbasuki tahun 2021 yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam penanganan stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sudah berjalan dengan cukup efektif, tetapi masih ada hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumberdaya manusia, komitmen kepala desa yang rendah, dominasi sektor kesehatan, dan masalah pengunggahan data.

Berdasarkan pemaparan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui penanganan masalah stunting di Kota Yogyakarta melalui proses kemitraan publik dan swasta melalui Program 1000 Pelangi Goes To Community serta faktor pendukung dan kendala selama penanganan masalah stunting di Kota Yogyakarta melalui proses kemitraan publik dan swasta.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan proses kemitraan publik dan swasta dalam penanganan masalah stunting di Kota Yogyakarta. Lokasi penelitian berada di Kota Yogyakarta dengan lokus penelitian berada pada 9 kalurahan di Kota Yogyakarta yaitu Kalurahan Terban, Klitren, Pringgokusuman, Muja Muju, Giwangan, Tahunan, Bener, Kricak, dan Karangwaru sekaligus ke posyandu dan masyarakat. Selain itu, juga ada Bappeda Kota Yogyakarta dan PKPU Human Initiative. Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Mei sampai Agustus 2023. Subjek penelitian ini yaitu 1) Ibu Prilia Astuti, S.E., MPM sebagai Kepala Sub Koordinator Bidang Pengembangan Dunia Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta : 2) Agus Triyono sebagai Kepala PKPU Human Initiative Cabang Yogyakarta: 3) Bapak Akhmad Zainuri, S.Sos sebagai Lurah Kelurahan Klitren: 4) Bapak Sigit Kusuma Atmaja, S.S., M.B.A sebagai Lurah Kelurahan Terban: 5) Ibu Caecilia Deasy Sandra Anindita, S.T sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru: 6) Ibu Anandany Prastantri, A.Md.Akt sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman: 7) Ibu Evi Zulfiah, S.E sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja Muju: 8) Ibu Kurniatun Tri Hanrawati sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Giwangan: 9) Ibu Dominica Heni, S.E sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan:

10) Bapak Mohammad Roman Feiruz S.T sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Kricak: 11) Ibu Siti Masrifah dari posyandu Kelurahan Tahunan: 12) Ibu Amin Suminah dari posyandu Kelurahan Muja-Muju: 13) Ibu Wati dari posyandu Kelurahan Pringgokusuman: 14) Ibu Partini dari posyandu Kelurahan Bener: 15) Ibu Siti masyarakat Kelurahan Kricak: 16) Bapak Wagiran dari Kelurahan Kricak: 17) Ibu Sami dari Kelurahan Bener: 18) Ibu Rena dari Kelurahan Tahunan. Alasan memilih subjek penelitian ini karena subjek-subjek tersebut memiliki keterkaitan dan ikut andil dalam pelaksanaan program 1000 Pelangi Goes To Community. Sumber data berasal dari pelaksanaan wawancara dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Peneliti mengumpulkan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pelaksanaan program 1000 Pelangi Goes To Community.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kemitraan yang Mengandalkan CSR atau TSLP

Dari latar belakang yang dijabarkan program 1000 Pelangi Goes To Community ini dilaksanakan atas dasar kemitraan publik dan swasta. Ternyata setelah penelitian dilakukan, program ini sifatnya kemitraan yang mengandalkan CSR atau TSLP karena program ini merupakan salah satu proses bisnis dari PT. Sarihusada Generasi Mahardhika. Sehingga, disini terdapat perbedaan dalam proses pelaksanaannya dari kemitraan publik dan swasta pada biasanya. Kemitraan yang seharusnya dilakukan harus jelas dalam pembagian pendanaan antara pemerintah dan pihak swasta, pemerintah tetap menjadi inti agensi, pembagian kerja yang kolaboratif dan intensif yang dimana pemerintah menjaga fungsi sistem integrasi tanpa ada dominasi satu pihak, dan insentif yang terintegrasi sehingga kemitraan publik dan swasta ini sifatnya berkelanjutan atau jangka panjang karena antar aktor terikat dalam perjanjian kerjasama. Berbeda halnya dari kemitraan publik dan swasta, CSR atau TSLP memiliki konsep yang berbeda walaupun pelaksanaannya juga melibatkan aktor lain salah satunya pemerintah. Kemitraan publik dan swasta (PPP) mempunyai komponen manfaat keuntungan (profit) bagi pihak swasta yang terlibat. Kontribusi bisnis bisa berupa pendampingan dana, produk atau layanan yang berada dalam lingkup bisnis perusahaan.

Sedangkan CSR atau TSLP sendiri adalah komitmen pihak swasta dalam turut serta membangun ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi pihak swasta, komunitas, maupun masyarakat (Nayenggita, 2019). Dasar pemahaman CSR ada tiga yaitu memiliki tiga konsep dasar yaitu perusahaan atau pihak swasta memiliki peran yang sifatnya sukarela (voluntary) dalam membantu pemerintah dalam mengatasi atau menanggulangi permasalahan sosial dan lingkungan, sehingga pihak swasta mempunyai kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Kedua, selain berorientasi pada profit atau keuntungan, perusahaan memisahkan sebagian keuntungan untuk melakukan kedermawanan (filantropi) yang bertujuan dalam pemberdayaan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi

dan eksploitasi. Ketiga, CSR atau TSLP ini adalah wujud dari kewajiban pihak swasta (obligation) untuk peduli terhadap permasalahan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan sekitar (Marnaelluy, 2019). Dari penjelasan tersebut, CSR atau TSLP dalam pelaksanaannya terkadang kurang berkelanjutan karena sifatnya yang sukarela sehingga bisa saja kedepannya perusahaan tersebut tidak memberikan CSR atau TSLP lagi sehingga TSLP atau CSR kurang menasar pada penyelesaian masalah pada masyarakat.

Dari penjelasan kemitraan yang kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian, perbedaan-perbedaan mendasar berdasarkan indikator dari teori hollow state oleh Profan dan Milward dalam pelaksanaan program 1000 Pelangi Goes to Community yaitu :

a. Mekanisme

Pada bagian ini menjelaskan tentang pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam penanganan masalah stunting di bidang pembiayaan, kontrak, dan evaluasi. Program 1000 Pelangi Goes To Community ini bersifat CSR atau TSLP sehingga pelaksanaannya secara menyeluruh didanai oleh PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dan dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri tidak mengeluarkan dana sama sekali. Jika dilihat dari teori hollow state menyatakan bahwa salah satu mekanisme pada pemerintahan yaitu pemberian dana. Seharusnya jika program ini berlandaskan kemitraan publik dan swasta, pemerintah Kota Yogyakarta harus berkontribusi dalam hal pendanaan yang pembagiannya dilakukan dengan kesepakatan dengan PT. Sarihusada Generasi Mahardhika. Terdapat perbedaan dalam mekanisme kontrak antara PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dan Pemerintah Kota Yogyakarta, di mana pemerintah hanya terlibat dalam proses formalitas. Sebaliknya, mekanisme kontrak antara PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dan PKPU Human Initiative didasarkan pada perjanjian kerjasama yang sudah berlangsung sejak tahun 2009. Perjanjian. Akan tetapi, jika merujuk pada teori hollow state, mekanisme kontrak yang dilakukan antara PT. Sarihusada Generasi Mahardhika dan Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya juga menggunakan perjanjian kerjasama sehingga hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi antara 2 instansi tersebut bisa lebih jelas dan efektif serta pemerintah bisa lebih berperan strategis. Teori ini juga menjelaskan bahwa ketika pemerintah mampu menjadi inti agensi dalam mengontrol mekanisme kemitraan, maka proses kemitraan tersebut bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi dan menjadikan terciptanya efektivitas kemitraan yang baik. Begitupun sebaliknya saat mekanisme dalam proses kemitraan terpisah-pisah, dan tidak terlihat pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi. Dalam program 1000 Pelangi ini, pemerintah kota Yogyakarta hanya mengurus urusan yang sifatnya birokratis atau formalitas saja sehingga tidak terlihat perannya sebagai inti agensi, tetapi yang menjadi inti agensi dari program 1000 ini ialah PKPU Human Initiative sebagai eksekutor lapangan. Jadi, proses kemitraan program ini terfragmentasi. Teks juga membahas mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta, serta pandangan kelurahan, PKPU Human Initiative, dan Posyandu mengenai program "1000 Pelangi Goes To

Community" ini. Beberapa evaluasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan termasuk perlu peningkatan kesadaran masyarakat, pemilihan waktu dan variasi dalam bantuan pemberian makanan.

b. Struktur

Pada bagian ini menjelaskan tentang pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta dalam penanganan masalah stunting dengan fokus pada tugas dan peran yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. Kemitraan ini bersifat terintegrasi, di mana pemerintah dan swasta bekerja bersama-sama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Meskipun begitu, pemerintah tetap memegang peran penting dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Bappeda Kota Yogyakarta, berperan sebagai fasilitator dalam program ini. Mereka membentuk sekretariat dan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) TSLP. Dalam forum ini, pihak swasta menjelaskan maksud dan tujuan program TSLP mereka, dan dilakukan koordinasi dengan pemerintah mengenai tindakan yang harus diambil untuk menjamin kesuksesan program TSLP. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan data terkait prevalensi stunting di kelurahan-kelurahan yang membutuhkan bantuan. Bappeda berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan ini untuk mengumumkan program "1000 Pelangi Goes To Community," yang didanai oleh PT. Sarihusada Generasi Mahardhika. PKPU Human Initiative merupakan mitra yang bertanggung jawab sebagai eksekutor program. Mereka mengelola berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program. Selain memberikan bantuan makanan, mereka juga mengadakan kegiatan urban farming untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kader posyandu berperan penting dalam membantu dalam pelaksanaan program ini, mengoordinasikan masyarakat, mengedukasi mereka, dan mendata kesehatan anak-anak dan ibu hamil.

Selama pelaksanaan program, PKPU Human Initiative melakukan evaluasi berkala untuk mengevaluasi capaian program, termasuk penambahan bibit sayuran dan buah-buahan serta bantuan makanan tambahan. Hasil evaluasi dipresentasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk PT. Sarihusada Generasi Mahardhika, Bappeda Kota Yogyakarta, dan instansi lain. Meskipun kemitraan ini terkoordinasi, pemerintah Kota Yogyakarta tidak terlibat dalam negosiasi dan monitoring pelaksanaan program karena program ini bersifat CSR atau TSLP. Peran pemerintah lebih terbatas pada fasilitator. Dalam hal monitoring, Bappeda dan kelurahan tidak aktif terlibat, sehingga pelaksanaan program diserahkan sepenuhnya kepada mitra PKPU Human Initiative, dengan dukungan kader posyandu. Pemerintah memberikan evaluasi dasar terhadap program yang dilaksanakan oleh PKPU Human Initiative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kemitraan ini, jika dilihat dari indikator struktur belum mencapai kemitraan publik dan swasta yang efektif. Meskipun ada kolaborasi yang terkoordinasi, peran pemerintah dalam aspek negosiasi dan

monitoring terbatas, dan pelaksanaan program sepenuhnya dijalankan oleh mitra swasta.

c. Insentif

Bagian ini membahas peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan fasilitas kepada PT. Sarihusada Generasi Mahardhika untuk mendukung pelaksanaan program "1000 Pelangi Goes to Community" yang efektif. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Sekretariat Forum TSLP

Sekretariat ini dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta sub bidang pengembangan dunia usaha. Tugas sekretariat meliputi membentuk dan melaksanakan forum TSLP, menyusun tata tertib forum TSLP, membuat dokumen perencanaan tentang program pembangunan daerah dengan forum TSLP, menyiapkan data dan informasi pelaksanaan forum TSLP, memfasilitasi komunikasi, memvalidasi laporan pelaksanaan, dan melakukan kegiatan administrasi forum TSLP.

2. Forum TSLP

Forum TSLP Kota Yogyakarta adalah forum komunikasi antara pemerintah Kota Yogyakarta dan perusahaan di lingkungan kota. Tujuannya adalah untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan program TSLP yang sesuai dengan pembangunan strategis pemerintah Kota Yogyakarta. Forum ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 157 Tahun 2023 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta.

3. Informasi Terkait Data dan Tempat Pelaksanaan

Dari forum TSLP, terjadi koordinasi antara perusahaan dan pemerintah untuk menentukan data yang diperlukan dan lokasi pelaksanaan program, yang seringkali berada di kemantren atau kelurahan. Bappeda Kota Yogyakarta menyediakan data yang dibutuhkan terkait TSLP yang akan diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini mendukung kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam melaksanakan program CSR atau TSLP untuk penanganan stunting dan masalah kesehatan masyarakat lainnya.

Kesulitan mencapai target prevalensi stunting diidentifikasi melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan. Beberapa kendala termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, seperti orang tua yang sibuk sehingga sulit mengikuti program 1000 Pelangi Goes To Community, kurangnya pelaporan bantuan makanan tambahan oleh keluarga, anak-anak yang sulit makan makanan yang disediakan, masalah identifikasi anak yang mengalami stunting, dan sensitivitas orang tua terhadap penandaan stunting anak mereka. Masyarakat perlu lebih mendukung dan sadar terhadap penanganan stunting, serta berkontribusi dalam upaya mengatasi masalah ini yang memiliki dampak luas pada berbagai

aspek kehidupan.. Program "1000 Pelangi Goes To Community" menghadapi beberapa kendala dan belum mencapai efektivitas penuh dalam kemitraannya. Namun, ada beberapa faktor pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program ini yaitu kader posyandu berperan aktif dalam membantu PKPU Human Initiative dalam menjalankan program ini. Mereka memberikan dukungan yang berarti dalam pelaksanaan program, kader posyandu melakukan pendataan secara teratur yang memungkinkan pelacakan kasus stunting menjadi lebih cepat dan efisien, pendanaan program ini sepenuhnya disokong oleh PT. Sarihusada Generasi Mahardhika. Ini memastikan kelancaran pelaksanaan program, meskipun kontribusi pemerintah terbatas, kelurahan menyediakan tempat pelaksanaan yang memadai untuk program ini, program ini melibatkan narasumber terbaik, yang membantu meningkatkan pengetahuan kader posyandu dan masyarakat, dan PKPU Human Initiative melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Ini melibatkan evaluasi mingguan, bulanan, tiga bulanan, dan tahunan. Ini membantu mengukur efektivitas program dan membuat perbaikan yang diperlukan.

3.2. Resiko Kemitraan Publik dan Swasta (PPP) yang Mengandalkan CSR atau TSLP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "1000 Pelangi" mengandalkan kemitraan yang didanai oleh CSR (Corporate Social Responsibility) atau TSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan). PT. Sarihusada Generasi Mahardhika merasa bertanggung jawab untuk mengatasi masalah stunting dan bermitra dengan Bappeda Kota Yogyakarta dan PKPU Human Initiative, sasaran utamanya adalah kader posyandu dan masyarakat. Namun, kemitraan yang mengandalkan CSR memiliki risiko tertentu, antara lain:

a. Peran Pemerintah yang Kurang Produktif:

Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dalam program CSR ini. Karena perusahaan mendanai program sepenuhnya, tidak ada ruang negosiasi atau pembagian kerja dengan pemerintah. Sebagian besar pelaksanaan program dilakukan oleh perusahaan atau mitra ketiga. Pemerintah hanya menunggu laporan dari mitra eksekutor di lapangan. Hal ini dapat membuat pemerintah menjadi kurang produktif dalam melaksanakan tugasnya.

b. Penanganan Lambat pada Masalah Masyarakat:

Program CSR ini terkadang kurang tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pemerintah tidak berperan sebagai agensi inti dalam program tersebut. Kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan program dapat menyebabkan lambatnya penanganan masalah masyarakat. Pemerintah harus terlibat dalam pengawasan program untuk memastikan bahwa program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun kemitraan CSR memberikan dukungan finansial yang signifikan, penting untuk mempertimbangkan peran pemerintah dalam pengawasan dan pengarahan program agar penanganan masalah masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

3.3. Format Kemitraan Publik dan Swasta yang Berkelanjutan

Pemerintah perlu mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan untuk mengatasi resiko-resiko yang ada dan membuat pelaksanaan program menjadi lebih efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup :

a. **Pembagian Pendanaan**

Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta dalam program kemitraan seperti "1000 Pelangi Goes To Community" untuk menentukan pembagian dana secara jelas. Ini akan memungkinkan produktivitas peran pemerintah, pengelolaan administratif yang lebih efisien, dan pembagian manfaat yang lebih transparan antara pihak swasta dan pemerintah.

b. **Transparansi dalam Pelaksanaan Program**

Dalam kemitraan publik dan swasta, penting untuk memastikan keterbukaan dan transparansi antara semua aktor yang terlibat. Ini akan membantu meminimalisir penyelewengan dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana.

c. **Pembagian Kerja yang Jelas, Intensif, dan Strategis**

Pemerintah perlu memainkan peran inti dalam kemitraan, terutama dalam hal negosiasi dan pengawasan program. Pembagian kerja harus jelas sehingga setiap aktor memiliki peran yang strategis dan intensif, menghindari dominasi satu pihak. Dengan demikian, insentif yang diberikan oleh pemerintah akan terintegrasi secara berkelanjutan, dan pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan mengadopsi pendekatan kemitraan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program seperti "1000 Pelangi Goes To Community". Ini akan memungkinkan peran yang lebih strategis bagi semua aktor, serta mempercepat penanganan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "1000 Pelangi Goes To Community" yang merupakan kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk mengatasi masalah stunting di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya efektif. Hal ini karena program tersebut mengandalkan CSR (Corporate Social Responsibility) dengan pendanaan penuh dari PT. Sarihusada Generasi Mahardhika tanpa kontribusi dana dari pemerintah. Ini tidak sesuai dengan konsep Hollow State yang menyatakan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam pembiayaan program.

Selain itu, peran pemerintah dalam program ini terbatas pada fasilitator, dengan pengawasan dan monitoring yang diserahkan kepada PKPU Human Initiative. Ini tidak sesuai dengan teori Hollow State yang menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak. Program ini juga masih memerlukan peningkatan dalam kesadaran masyarakat, terutama dalam hal partisipasi dalam program dan kesadaran akan pentingnya mencegah stunting. Beberapa kendala termasuk kurangnya kesadaran orang tua, masalah pilihan makanan anak, kesibukan orang tua, dan masalah identitas anak yang belum terdaftar dengan baik.

Pada sisi positif, ada faktor pendukung yang termasuk kader posyandu yang aktif, pendanaan penuh dari PT. Sarihusada Generasi Mahardhika, penyediaan tempat pelaksanaan yang memadai, pelaksanaan program yang melibatkan narasumber berkualitas, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PKPU Human Initiative secara berkala. Secara keseluruhan, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan termasuk pembagian dana yang lebih adil, peningkatan transparansi, pembagian kerja yang lebih jelas, dan peran aktif pemerintah dalam program kemitraan. Dengan demikian, program ini memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif dalam mengatasi masalah stunting.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya penelitian sebelumnya mengenai kemitraan publik dan swasta dalam penanganan stunting yang sesuai dengan Teori Profan dan Milward, sehingga penelitian ini masih ada kelemahan pada analisisnya. Selain itu, perlu diperbanyak kembali data terkait hasil dari kemitraan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggali lebih banyak lagi hasil penelitian terkait kemitraan.

Saran untuk para pemangku kepentingan dalam kemitraan publik dan swasta yaitu 1. Perlu mekanisme kontrak yang lebih mengikat antara pemerintah Kota Yogyakarta dan PT. Sarihusada Generasi Mahardhika terutama pembagian pendanaan agar pemerintah dapat lebih produktif, perlu pembagian kerja yang jelas dan intensif serta pemerintah Kota Yogyakarta harus menjadi inti agensi dengan melakukan fungsi negosiasi dan pengawasan agar pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, transparansi dalam pelaksanaan agar meminimalisir penyelewengan dalam pelaksanaan program, diharapkan masyarakat tidak malas lagi untuk mengambil bantuan tambahan makanan dan diharapkan bantuan makanan tersebut benar-benar dimakan oleh anak yang mengalami stunting, dan perlu adanya koordinasi yang lebih gencar antara pihak kelurahan dan PKPU Human Initiative lagi terkait penyelenggaraan sehingga bisa meminimalisir bentrokan acara.

Referensi

- [1] Al-Azhar, M.L., Hardjanto, I., Hadi, M. (2013). Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(5). 1048-1057
- [2] Al-Mas'ud, W.(2019). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5468-Full_Text.pdf
- [3] Arifin. 2012. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemberian ASI eksklusif. *Medical Journal of Lampung University*. 2 (4).
- [4] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dan Biro Pusat Statistik (BPS). (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Diakses pada tanggal 17 November 2022 dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>
- [5] Balitbang Kesehatan Kementerian Kesehatan. (2013). *Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013: Laporan Nasional*. Jakarta: Balitbang Kesehatan Kemenkes. Diakses pada tanggal 5 November 2022 dari http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2013/Laporan_riskesdas_2013_final.pdf

- [6] Berhanu, Getnet & Abebe, Solomon & Sisay, Mekonnen. (2018). Prevalence of Stunting and Associated Factors Among Preschool Children: A Community Based Comparative Cross Sectional Study in Ethiopia. *BMC Nutrition*. 4.
- [7] Bonso, H., & Irwan. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 2. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9665>
- [8] Chaerunissa, S. F. (2020). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.
- [9] Dafriadi. (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19253-Full_Text.pdf
- [10] De Onis, M., Dewey, K. G., Borghi, E., Onyango, A. W., Blössner, M., Daelmans, B., Piwoz, E., & Branca, F. (2013). The World Health Organization's Global Target for Reducing Childhood Stunting by 2025: Rationale and Proposed Actions. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2), 6–26. <https://doi.org/10.1111/mcn.12075>
- [11] Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. *The New Public Service*, M.E. Sharpe, New York
- [12] Fajriani, S., Fatmawati, F., & Abdi, A. (2020). Tata Kelola Kemitran Corporate Social Responsibility Pt Semen Tonasa Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Biring Ere Tonasa Ii Kabupaten Pangkep. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4569>
- [13] Fauziah, A. dan Okinarum, G.Y. (2020). Fenomena Riwayat Pemberian Makanan Pendamping Asi (MPASI) dan Pola Makan Anak dalam Penanggulangan Malnutrisi untuk Pencegahan Stunting Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Jaringan Kerjasama Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*. 16. 1-25
- [14] Febrian, F., & Yusran, R. . (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3(1), 11–21.
- [15] Grossman, A.S. (2015). *Partnership Governance*. Perancis: International Public Policy Association
- [16] Id, M. K. A., Almubark, S., Qattan, A. M. N., Cenkier, A., & Kosycarz, E. A. (2020). Barriers to the implementation of public- private partnerships in the healthcare sector in the Kingdom of Saudi Arabia. 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233802>
- [17] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Kemenkes RI. Diakses pada tanggal 22 November 2022 dari <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf>
- [18] Kriswibowo, Arimurti, Amelia Wahyuningtiyas, Nur Wandira, dan Khusnul Prasetyo. (2021). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid - 19 Di Kota Madiun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. 6(1):8–18.
- [19] Larasati, N.N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 25-59 bulan di Posyandu Wilayah Puskesmas Wonosari II Tahun 2017. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1719/>
- [20] Lexy. J.Moleong, (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [21] Lisanu Mazengia, A., & Andargie Biks, G. (2018). Predictors of Stunting among School-Age Children in Northwestern Ethiopia. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2018, 1–7.
- [22] Marnelly, T. R. (2012). *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2), 49–59.

- [23] Mesfin, F., Berhane, Y., & Worku, A. (2015). Prevalence and Association Factors of Stunting Among Primary School Children in Eastern Ethiopia. *Nutrition and Dietary Supplement*, 7:61-68.
- [24] Mulenga, C. And Matsalabi, A. A. (2017) 'Examining The Factors Influencing Child Stunting Among Rural Households In Zambia : The Case Of Sinda District Examining The Factors Influencing Child Stunting Among Rural Households In Zambia : The Case Of Sinda District'. *Nutrition Research Review*. 7(8)
- [25] Mulyani, S. (2017). Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. *Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 37–45.
- [26] Nasution. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta : Sinar Grafika
- [27] Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>
- [28] Ngaisyah, D.R., (2015). Hubungan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul. *Jurnal Medika Respati*.10(4). 65-70
- [29] Nimah Sulfiani, Andi. (2020). Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo. *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*. 3(1):48–56.
- [30] Novayanti Sopia Rukmana, G. S. (2015). Kerjasama Publik dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Administrasi*.1(1), 37–45.
- [31] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif
- [32] Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program 8000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).
- [33] Pierre, J dan Peters, G.B. (2000). *Governance, Politics and The State*. New York: MacMillan Press
- [34] Prahastuti, B. S. (2020). Kajian Kebijakan: Kemitraan Publik Swasta Penanggulangan Stunting di Indonesia Dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(1), 52–61. <https://doi.org/10.37012/jik.v12i1.124>
- [35] Provan, Keith G. and Milward H. Brinton 1994, *Governing the Hollow State* (*Journal of Public Administration Research and Theory*), 364/J.Part.10
- [36] Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Rahman, F. (2015). Birth Weight Records with Stunting Incidence among Children under Two Years Old. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 10(2), 67–73.
- [37] Ramelan, R. (1997). *Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta : Koperasi Jasa Profesi LPPN
- [38] Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- [39] Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 80–95.
- [40] Sitindaon, I. S., Anggusti, M., & Sihotang, L. (2017). Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). *PATIK : Jurnal Hukum*.6(3), 165–177.
- [41] Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- [42] Suharsimi Arikunto. (1995) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [43] Sutarto, Mayasari, D., dan Indriyani, R. (2018). Stunting, Faktor Resiko, dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*. 5(1). 1-6

- [44]Taschereau dan Campos. 1997. Good Governance. Jakarta: Publikasi UNDP
- [45]Uji, A. Y. T. (2015). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka Andi Yanti Tenri Uji Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 1(2), 169–180.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1025>
- [46]Zulkarnain, F.M.(2017). Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. <https://core.ac.uk/download/89564897.pdf>
- [47]Zurhayati, Z., & Hidayah, N. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 6(1), 1–10.
<https://doi.org/10.36341/jomis.v6i1.1730>